

Etika Kepemimpinan Islam dan Fenomena Nepotisme: Studi Kualitatif atas Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan

*Fitriyani¹, Achmad Maftuh Sujana², Lestari³, Muhamad Wildan Septiana⁴, Putra Panjalu⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Bimbingan Konseling Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Co-Author: * Fitriyani

E-mail: * 231340086.fitri@uinbanten.ac.id¹, achmad.maftuh@uinbanten.ac.id², 231340113.les@uinbanten.ac.id³, 231340083.muhamad@uinbanten.ac.id⁴, 231340089.Putra@uinbanten.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang etika kepemimpinan Islam dan fenomena nepotisme pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji tuduhan nepotisme yang diarahkan kepada Utsman serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam Islam seperti keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*asy-syūrā*). Data diperoleh dari berbagai literatur klasik dan modern yang relevan, termasuk kitab sejarah, jurnal ilmiah, dan sumber normatif Al-Qur'an serta Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Utsman dalam mengangkat kerabatnya bukanlah bentuk nepotisme negatif, melainkan keputusan rasional dan strategis yang didasari oleh pertimbangan kompetensi, loyalitas, serta tanggung jawab terhadap kestabilan pemerintahan Islam. Tuduhan nepotisme terhadap beliau lebih bersifat politis dan berakar pada konflik sosial yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah persatuan umat Islam.

Kata Kunci: Etika Kepemimpinan, Nepotisme, Utsman bin Affan

ABSTRACT

This study discusses Islamic leadership ethics and the phenomenon of nepotism during the caliphate of Uthman ibn Affan, using a library research method and a qualitative descriptive approach. The main focus of this research is to examine the allegations of nepotism directed at Uthman and to analyze them through the principles of Islamic leadership ethics such as justice (*al-'adl*), trustworthiness (*al-amānah*), and consultation (*ash-shūrā*). Data were collected from various classical and modern literatures, including historical works, academic journals, and normative sources from the Qur'an and Hadith. The findings indicate that Uthman's policy of appointing his relatives was not an act of negative nepotism but a rational and strategic decision based on competence, loyalty, and responsibility for maintaining political stability within the Islamic state. The accusations of nepotism against him were largely political in

nature and stemmed from social conflicts exploited by certain groups to divide the unity of the Muslim community.

Keywords: Leadership Ethics, Nepotism, Uthman ibn Affan



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta menuntun masyarakat menuju kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin bukan hanya pengatur urusan duniawi, tetapi juga penjaga nilai-nilai spiritual dan moral umat. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah (الأمانة) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. (Adhi, 2024) Oleh karena itu, pemimpin dalam Islam harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan yang diambil. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi dasar bahwa jabatan dan kekuasaan bukanlah kehormatan, melainkan ujian besar yang menuntut pemimpin untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Salah satu figur penting dalam sejarah kepemimpinan Islam yang banyak mendapat sorotan adalah Khalifah Utsman bin Affan khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang dermawan, berakhlak lembut, dan sangat pemalu. Pada masa kepemimpinannya (644–656 M), Islam mencapai kemajuan yang pesat, baik dalam bidang perluasan wilayah, penyusunan administrasi pemerintahan, hingga penyatuan bacaan Al-Qur’an dalam satu mushaf standar. Namun, di balik berbagai keberhasilan tersebut, masa kepemimpinan Utsman juga diwarnai oleh fitnah besar, yaitu tuduhan nepotisme, yang berujung pada pemberontakan dan tragedi pembunuhan terhadap beliau. Tuduhan ini menjadi salah satu peristiwa paling rumit dalam sejarah Islam karena melibatkan konflik politik, sosial, dan ideologis yang mendalam.

Isu nepotisme yang diarahkan kepada Utsman berawal dari kebijakannya mengangkat beberapa kerabatnya dari Bani Umayyah pada jabatan strategis, seperti Mu’awiyah bin Abi Sufyan di Syam, Abdullah bin Amir di Basrah, dan Marwan bin al-Hakam sebagai sekretaris negara. Sebagian kelompok menilai keputusan ini sebagai tindakan yang mementingkan keluarga, sedangkan sebagian lainnya melihatnya sebagai langkah rasional demi menjaga stabilitas pemerintahan yang wilayahnya semakin luas. Tuduhan ini kemudian diperkuat oleh propaganda politik yang disebar oleh pihak-pihak

tertentu, khususnya oleh Abdullah bin Saba', seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan memecah belah umat. Akibat fitnah yang terorganisir ini, muncul ketegangan sosial dan politik yang berujung pada pemberontakan besar di berbagai wilayah Islam. (Dalimunthe, 2024)

Dalam konteks etika kepemimpinan Islam, tuduhan tersebut perlu dikaji secara objektif dan ilmiah. Islam tidak melarang pemberian jabatan kepada kerabat selama didasari pada pertimbangan kompetensi (الكفاءة), amanah (الأمانة), dan keadilan (العدل). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Dengan demikian, pengangkatan kerabat oleh Utsman tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai nepotisme dalam arti negatif, sebab mereka yang diangkat adalah sosok-sosok berkompeten dan berintegritas yang telah terbukti berjasa dalam menegakkan pemerintahan Islam. Dampak dari isu nepotisme terhadap kondisi sosial-politik umat Islam saat itu sangat besar. Fitnah yang tersebar luas menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan, bahkan memecah belah umat menjadi dua kelompok besar: pendukung dan penentang Utsman. Perpecahan ini tidak hanya mengguncang tatanan politik, tetapi juga menimbulkan luka sosial yang mendalam dalam sejarah umat Islam. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa lemahnya komunikasi dan kurangnya transparansi dalam kebijakan politik dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak kesatuan umat. Sebaliknya, dari peristiwa ini pula umat belajar bahwa prinsip syura (الشورى), kejujuran, dan keterbukaan sangat penting dalam menjaga stabilitas kepemimpinan Islam.

Dari perjalanan dan ujian yang dialami Khalifah Utsman bin Affan, dapat diambil berbagai nilai etis dan pelajaran penting dalam kepemimpinan. Di antaranya adalah keutamaan amanah, keadilan, kesabaran, tawadhu', serta komitmen terhadap persatuan umat. Utsman menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang tetap teguh dalam kebenaran meskipun difitnah dan diuji dengan kezaliman. Sikapnya yang sabar, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, serta keberaniannya untuk mempertahankan prinsip tanpa melanggar hukum Allah SWT menjadi contoh abadi bagi generasi pemimpin Islam sepanjang masa. Dengan demikian, studi mengenai Etika Kepemimpinan Islam dan Fenomena Nepotisme pada Masa Khalifah Utsman bin Affan bukan sekadar refleksi sejarah, tetapi juga cerminan moral dan nilai-nilai kepemimpinan yang relevan untuk

diterapkan dalam konteks pemerintahan modern yang berkeadilan dan berintegritas. (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji yakni etika kepemimpinan Islam dan fenomena nepotisme pada masa Khalifah Utsman bin Affan berkaitan erat dengan konteks sejarah, nilai-nilai normatif Islam, serta interpretasi terhadap teks-teks klasik dan modern. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat menelusuri makna yang mendalam dari kebijakan Utsman dalam perspektif moral dan etika, bukan sekadar menilai berdasarkan fakta empiris yang bersifat kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada data historis, tetapi juga pada pemahaman kontekstual dan penafsiran nilai yang terkandung di dalamnya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai literatur seperti buku sejarah Islam klasik, karya ilmiah modern, jurnal akademik, artikel penelitian, dan literatur tafsir yang berkaitan dengan tema kepemimpinan dan etika Islam. Sumber-sumber utama meliputi kitab-kitab sejarah karya ulama terdahulu seperti Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Mas'udi, serta referensi kontemporer seperti karya Philip K. Hitti, M. Abdul Karim, dan berbagai jurnal ilmiah yang membahas tentang masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber normatif dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai rujukan utama dalam memahami konsep etika kepemimpinan Islam dan prinsip keadilan dalam pemberian amanah jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Kepemimpinan dalam Islam

Etika kepemimpinan dalam Islam merupakan prinsip moral dan spiritual yang mengarahkan seorang pemimpin untuk menjalankan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai hak istimewa. Kepemimpinan dalam pandangan Islam dipandang sebagai bentuk ibadah yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin, baik dalam skala kecil maupun besar, harus menyadari tanggung jawabnya bukan

hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT yang memberikan amanah kepemimpinan tersebut.

Prinsip pertama dalam etika kepemimpinan Islam adalah keadilan (العدل). Seorang pemimpin dituntut untuk menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, kekerabatan, atau kepentingan kelompok tertentu. Keadilan menjadi asas utama dalam menjaga keseimbangan masyarakat dan mencegah munculnya kedzaliman. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak bagi setiap pemimpin, karena dengan keadilan masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan kepercayaan terhadap pemerintah akan terjaga.

Prinsip kedua yang sangat penting adalah amanah (الأمانة). Amanah berarti menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab dengan jujur serta tidak mengkhianatinya. Seorang pemimpin yang amanah tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfāl ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Ayat ini menjadi peringatan keras bagi para pemimpin agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, karena amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat berat di sisi Allah SWT.

Prinsip berikutnya dalam etika kepemimpinan Islam adalah musyawarah (الشورى). Musyawarah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bersifat partisipatif, bukan otoriter. Pemimpin dituntut untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari rakyat atau para penasihatnya dalam mengambil keputusan penting. (Azhari, 2024)

Etika kepemimpinan Islam juga menekankan aspek akhlak (الأخلاق) dan keteladanan. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai contoh moral bagi rakyatnya. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam hal ini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzāb ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari akhir, serta banyak mengingat Allah.”

Ayat ini mempertegas bahwa kepemimpinan yang efektif dalam Islam bukan hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial, tetapi juga oleh kepribadian yang luhur dan keteladanan akhlak pemimpinnya. Dengan demikian, etika kepemimpinan Islam merupakan panduan menyeluruh yang meliputi nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan akhlak mulia. Seorang pemimpin ideal dalam Islam adalah pemimpin yang adil dalam kebijakan, amanah dalam tanggung jawab, bijak dalam bermusyawarah, dan menjadi teladan moral bagi masyarakatnya. Nilai-nilai inilah yang menjaga agar kepemimpinan tidak berubah menjadi alat penindasan atau praktik nepotisme, melainkan menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang diridhai oleh Allah SWT.

Tuduhan Nepotisme terhadap Khalifah Utsman bin Affan

Tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu isu politik paling sensitif dalam sejarah pemerintahan Islam klasik. Isu ini muncul terutama pada periode kedua masa kekhalifahannya, ketika Utsman dianggap terlalu banyak mengangkat kerabat dekatnya dari Bani Umayyah untuk menduduki jabatan strategis di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Beberapa pihak, termasuk sebagian sahabat dan masyarakat umum, menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kecenderungan favoritisme yang mengabaikan asas keadilan dan musyawarah. Akibatnya, timbullah ketegangan sosial yang semakin memuncak dan akhirnya melahirkan pemberontakan besar di beberapa wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Namun, untuk memahami isu ini secara adil, perlu dilihat latar belakang, konteks politik, serta nilai etika Islam yang melandasi kebijakan Utsman.

Utsman bin Affan berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, yaitu Bani Umayyah, yang secara historis memiliki posisi kuat dalam struktur sosial Arab. Setelah menggantikan Umar bin Khattab pada tahun 644 M, Utsman mewarisi wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas, membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Kondisi ini menuntut pengelolaan pemerintahan yang kuat dan stabil, termasuk pengawasan terhadap para gubernur di wilayah yang jauh dari Madinah. Dalam konteks inilah, Utsman menunjuk sejumlah kerabat dekat yang ia percayai memiliki kemampuan dan kesetiaan tinggi untuk membantu menjaga integritas pemerintahan. Namun kebijakan tersebut kemudian dipelintir oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai bentuk nepotisme, yaitu memberikan jabatan kepada keluarga tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan. Tuduhan inilah yang menjadi bahan propaganda bagi kelompok oposisi, terutama yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba' seorang tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk memecah belah umat. (Andri, 2024)

Di antara kerabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam, Abdullah bin Amir bin Kuraiz sebagai gubernur Basrah, Al-Walid bin Uqbah sebagai

gubernur Kufah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh sebagai gubernur Mesir, serta Marwan bin al-Hakam sebagai sekretaris negara. Kelima tokoh ini memang memiliki hubungan keluarga dengan Utsman, baik sebagai sepupu, saudara tiri, maupun ipar. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, masing-masing dari mereka memiliki catatan kemampuan dan pengalaman administratif yang kuat. Misalnya, Mu'awiyah bin Abi Sufyan telah menjadi gubernur sejak masa Umar bin Khattab dan dikenal mampu mengelola wilayah Syam dengan baik serta menjaga stabilitas politik di kawasan tersebut. Al-Walid bin Uqbah dikenal sebagai panglima perang yang tangguh dan pernah memimpin pasukan Islam dalam beberapa ekspedisi penting. Dengan demikian, kebijakan Utsman tersebut bukan semata karena hubungan darah, tetapi juga berdasarkan kompetensi dan loyalitas dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Dalam pandangan Islam, nepotisme atau al-'atsarah (الأثرة) memang termasuk perilaku tercela apabila dilakukan dengan mengutamakan kerabat tanpa memperhatikan kompetensi dan keadilan. Namun Islam tidak melarang seorang pemimpin mengangkat keluarga atau kerabatnya apabila mereka memiliki keahlian dan amanah untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini menjadi dasar bahwa yang diutamakan dalam pemberian jabatan adalah amanah dan kelayakan, bukan garis keturunan. Oleh karena itu, tindakan Utsman tidak dapat disebut nepotisme dalam makna negatif, karena para pejabat yang diangkatnya terbukti memiliki kompetensi dan kontribusi besar bagi perkembangan wilayah Islam.

Tuduhan nepotisme terhadap Utsman semakin diperparah oleh propaganda politik yang dilakukan oleh kelompok pemberontak yang tidak menyukai stabilitas kekuasaan Bani Umayyah. Abdullah bin Saba' dan pengikutnya memanfaatkan sentimen kesukuan lama antara Bani Umayyah dan Bani Hasyim untuk menebar fitnah bahwa Utsman telah mengkhianati prinsip keadilan Islam dengan mengangkat keluarganya sendiri. Fitnah ini cepat menyebar di tengah masyarakat yang mulai mengalami kesenjangan sosial akibat perluasan wilayah dan perubahan ekonomi yang pesat. Sebagian masyarakat awam yang tidak memahami konteks kebijakan Utsman termakan isu tersebut, sehingga timbul persepsi negatif yang semakin memperkeruh keadaan. Dalam situasi yang genting itu, Utsman memilih bersikap sabar dan tidak melakukan kekerasan terhadap para pemberontak, meskipun memiliki kekuatan militer untuk melawan.

Sikap sabar dan menghindari pertumpahan darah ini menunjukkan keteguhan moral dan etika kepemimpinan Utsman yang mengedepankan perdamaian di atas kekuasaan. (Fahlevi, 2023)

Dengan demikian, tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Utsman bin Affan lebih bersifat politis daripada faktual. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir, Ath-Thabari, dan Al-Mas'udi menjelaskan bahwa Utsman mengangkat para pejabatnya bukan karena kedekatan keluarga semata, tetapi karena keahlian dan kesetiaan mereka terhadap Islam. Bahkan banyak di antara mereka yang terbukti berprestasi dalam bidang pemerintahan, pertahanan, dan perluasan wilayah Islam. Etika kepemimpinan Islam tidak menolak hubungan keluarga dalam birokrasi selama hal itu didasarkan pada prinsip amanah, profesionalitas, dan keadilan. Oleh sebab itu, tuduhan nepotisme yang diarahkan kepada Utsman sejatinya adalah bentuk fitnah politik yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas khalifah yang saleh, dermawan, dan penuh integritas ini. Sejarah pun mencatat bahwa keputusannya tetap dikenang sebagai bentuk ijtihad seorang pemimpin yang berusaha menjaga kesatuan umat Islam di tengah kompleksitas sosial dan politik pada zamannya.

Rasionalisasi dan Pembelaan atas Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan

Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan dalam mengangkat kerabat-kerabatnya pada posisi strategis dalam pemerintahan sering kali dituduh sebagai bentuk nepotisme. Namun, jika ditelusuri secara mendalam dengan perspektif sejarah dan etika kepemimpinan Islam, kebijakan tersebut justru merupakan bentuk ijtihad politik yang memiliki dasar rasional dan pertimbangan strategis. Utsman menghadapi situasi pemerintahan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dua khalifah sebelumnya, karena wilayah kekuasaan Islam telah meluas dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Dalam kondisi seperti itu, ia memerlukan pejabat yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki loyalitas tinggi terhadap khalifah dan kesetiaan pada sistem pemerintahan Islam. Oleh sebab itu, pengangkatan keluarga dan kerabat yang telah terbukti amanah dan berpengalaman menjadi keputusan rasional demi menjaga stabilitas politik dan keamanan kekhalifahan yang begitu luas.

Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dan penuh kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Ia tidak serta merta mengangkat kerabatnya tanpa pertimbangan, melainkan setelah menilai kemampuan dan catatan pengabdian mereka. Misalnya, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang menjadi Gubernur Syam, telah memegang jabatan tersebut sejak masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Di bawah kepemimpinan Mu'awiyah, wilayah Syam menjadi salah satu provinsi paling stabil dan maju dalam bidang ekonomi serta pertahanan. Begitu pula Abdullah bin Amir bin Kuraiz, sepupu Utsman, yang dikenal sebagai pemimpin muda yang sukses memimpin

ekspedisi penaklukan ke wilayah Persia dan Khurasan. (Bawazir, 2021) Dalam konteks inilah, tindakan Utsman lebih tepat dipahami sebagai kebijakan rasional berbasis profesionalitas, bukan sebagai penyimpangan dari prinsip keadilan Islam. Ia menempatkan orang yang dikenal dekat, tetapi juga terbukti berintegritas dan kompeten dalam mengemban tugas-tugas negara.

Dalam etika kepemimpinan Islam, amanah dan kompetensi menjadi dasar utama dalam pemberian tanggung jawab jabatan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa dua kriteria utama dalam kepemimpinan dan pengelolaan amanah adalah kekuatan (kompetensi) dan kejujuran (amanah). Kedua hal ini juga menjadi dasar pertimbangan Utsman dalam menentukan para pejabat di masa pemerintahannya. Artinya, selama mereka memenuhi kriteria tersebut, status kekerabatan bukanlah hal yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, tindakan Utsman dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan kesatuan umat Islam dari potensi perpecahan politik. Dalam situasi di mana muncul banyak faksi dan kepentingan antar-suku di wilayah kekuasaan Islam, memilih orang-orang yang telah dikenal kepribadiannya dan loyalitasnya justru menjadi strategi yang bijak. Ia memahami bahwa menjaga keutuhan umat lebih penting daripada mempertahankan pandangan ideal yang tidak realistis dalam kondisi sosial yang beragam. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali 'Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.”

Utsman mengutamakan persatuan umat daripada menuruti tekanan politik dari kelompok tertentu. Oleh karena itu, kebijakannya dalam memilih pejabat dari kalangan keluarga terdekat justru merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga kesatuan politik dan spiritual umat Islam.

Selain faktor politik dan keamanan, ada pula dimensi keagamaan dan moral yang mendasari pembelaan terhadap kebijakan Utsman. Ia memandang jabatan pemerintahan sebagai sarana dakwah dan penegakan syariat, bukan sebagai sarana memperkaya keluarga atau kelompok tertentu. Para kerabat yang diangkatnya juga dikenal memiliki rekam jejak ketaatan dalam ibadah dan kesalehan pribadi. Misalnya, Al-Walid bin Uqbah dikenal sebagai salah satu sahabat yang ikut menulis wahyu dan memiliki kemampuan militer, sementara Marwan bin al-Hakam dikenal sebagai ahli administrasi dan

penulis yang cermat. (Sidik, 2021) Utsman memahami bahwa pemimpin yang baik tidak hanya harus cakap, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kebijakan tersebut selaras dengan prinsip masalah mursalah, yaitu mendahulukan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Dari perspektif sejarah dan etika kepemimpinan Islam, pembelaan terhadap kebijakan Utsman memiliki dasar yang kuat. Ia tidak melanggar prinsip keadilan maupun amanah yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi justru menerapkannya dalam konteks yang lebih luas untuk menjaga ketertiban dan kestabilan umat. Tuduhan nepotisme yang dialamatkan kepadanya lebih banyak bersumber dari fitnah politik yang digerakkan oleh pihak-pihak yang iri terhadap stabilitas dan kemakmuran masa pemerintahannya. Dalam sejarah Islam, Utsman dikenal sebagai khalifah yang lembut, dermawan, dan mencintai perdamaian. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menghindari pertumpahan darah sesama Muslim, bahkan ketika nyawanya terancam. Oleh sebab itu, kebijakannya dalam mengangkat kerabat bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan bagian dari strategi etis seorang pemimpin yang berusaha menjaga amanah Allah SWT dengan cara terbaik.

Rasionalisasi kebijakan Khalifah Utsman bin Affan menunjukkan bahwa keputusan-keputusan politiknya memiliki dasar pertimbangan yang kuat, baik dari sisi etika, hukum, maupun kebutuhan strategis negara. Ia menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang berpijak pada amanah (الأمانة), keadilan (العدل), musyawarah (الشورى), dan persatuan (الوحدّة). Tuduhan nepotisme yang diarahkan kepadanya sejatinya adalah kesalahpahaman historis dan fitnah politik yang tidak berdasar. Sejarah Islam justru menempatkan Utsman bin Affan sebagai sosok pemimpin yang saleh dan penuh kebijaksanaan, yang menegakkan prinsip etika kepemimpinan dengan mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi dan keluarga.

Dampak Sosial-Politik Isu Nepotisme pada Masa Khalifah Utsman bin Affan

Isu nepotisme yang diarahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan membawa dampak sosial dan politik yang sangat besar dalam perjalanan sejarah Islam. Tuduhan bahwa Utsman terlalu banyak memberikan jabatan kepada kerabatnya dari Bani Umayyah memunculkan kekecewaan dan ketegangan di kalangan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah baru kekuasaan Islam seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Para pemberontak menuduh bahwa kebijakan tersebut tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Padahal, dalam kenyataannya, para kerabat yang diangkat oleh Utsman memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni dalam bidang pemerintahan dan militer. Namun, persepsi negatif yang terlanjur menyebar di masyarakat, terutama akibat provokasi dan

propaganda politik, telah menciptakan ketidakpercayaan terhadap pusat kekhalifahan di Madinah. Inilah yang kemudian menjadi pemicu utama munculnya pemberontakan dan disintegrasi politik yang mengguncang umat Islam.

Secara sosial, isu nepotisme memperlemah solidaritas dan rasa persaudaraan di antara umat Islam. Masyarakat pada masa itu mulai terpecah menjadi dua kelompok besar: kelompok pendukung Khalifah Utsman yang tetap loyal kepada pemerintahan pusat, dan kelompok oposisi yang menilai bahwa pemerintahan Utsman tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan Islam. Perpecahan ini tidak hanya terjadi di tingkat elit politik, tetapi juga merembes ke masyarakat luas. Sebagian rakyat di daerah-daerah merasa tidak lagi memiliki akses yang adil terhadap pemerintahan pusat, sementara kelompok pemberontak memanfaatkan perasaan tersebut untuk menebarkan fitnah dan memperkuat pengaruhnya. Dalam situasi seperti itu, umat Islam kehilangan semangat ukhuwah yang menjadi fondasi kekuatan mereka, sehingga fitnah dan permusuhan semakin mudah berkembang di antara sesama Muslim.

Dari segi politik, isu nepotisme telah mengguncang stabilitas pemerintahan Islam. Tuduhan yang disebar oleh tokoh munafik seperti Abdullah bin Saba', yang berpura-pura memeluk Islam, telah berhasil menanamkan benih kebencian dan kecurigaan terhadap khalifah. Abdullah bin Saba' memainkan peran besar dalam mengorganisir kelompok pemberontak di Mesir dan Irak untuk menentang kepemimpinan Utsman dengan dalih keadilan dan reformasi pemerintahan. Padahal tujuan utamanya adalah memecah belah umat Islam dari dalam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat ini relevan dengan peristiwa masa itu, karena banyak kaum Muslimin yang mempercayai berita bohong tentang Utsman tanpa memverifikasi kebenarannya, sehingga terjerumus dalam fitnah dan pemberontakan yang mengorbankan persatuan umat. Selain menciptakan gejolak politik, isu nepotisme juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam terhadap masyarakat Islam. Fitnah yang menyebar luas membuat rakyat kehilangan rasa percaya kepada kepemimpinan yang sebelumnya sangat dihormati. Utsman, yang dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang dermawan dan pemalu, tiba-tiba dicap sebagai pemimpin yang zalim dan nepotis. Gambaran ini menciptakan kebingungan dan kegelisahan di kalangan masyarakat yang selama ini hidup dalam ketenangan dan kemakmuran. Banyak di

antara mereka yang termakan hasutan pemberontak dan akhirnya ikut melakukan tindakan anarkis. Kondisi sosial umat Islam pun menjadi tidak stabil, bahkan sebagian wilayah mengalami kekacauan politik yang berujung pada konflik berdarah, termasuk peristiwa tragis terbunuhnya Khalifah Utsman di Madinah.

Di sisi lain, dampak politik dari isu nepotisme juga memperkuat pertentangan antara dua kelompok besar dalam sejarah Islam, yaitu Bani Umayyah dan Bani Hasyim. Persaingan lama antara kedua keluarga Quraisy ini kembali muncul ke permukaan setelah Utsman mengangkat beberapa pejabat dari Bani Umayyah. Kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, dari Bani Hasyim, menilai bahwa pemerintahan Utsman telah condong kepada keluarganya sendiri. Meskipun Ali sendiri tidak pernah menuduh Utsman berbuat nepotisme dan bahkan sempat membela khalifah, namun sebagian pendukungnya menggunakan isu ini untuk memperkuat posisi politik mereka. Akibatnya, pasca wafatnya Utsman, muncul gelombang konflik politik besar yang dikenal dengan fitnah kubra (fitnah besar), yang mengakibatkan perpecahan pertama dalam tubuh umat Islam dan melahirkan berbagai aliran serta kelompok politik baru.

Meski demikian, dari sisi positif, peristiwa ini juga memberikan pelajaran berharga bagi sejarah kepemimpinan Islam. Umat Islam mulai menyadari pentingnya prinsip transparansi (الشفافية), keadilan (العدل), dan akuntabilitas (المسؤولية) dalam menjalankan pemerintahan. Kasus yang menimpa Khalifah Utsman menunjukkan bahwa sebuah pemerintahan, meskipun dijalankan oleh orang saleh sekalipun, tetap rentan terhadap fitnah apabila komunikasi publik tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi refleksi penting tentang perlunya pengawasan dan keterbukaan dalam sistem pemerintahan Islam agar tidak mudah disusupi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sempit.

Dampak sosial-politik dari isu nepotisme pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak hanya terbatas pada pemberontakan fisik, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan perpecahan ideologis dalam tubuh umat Islam. Tuduhan yang semula tidak berdasar itu berhasil mengguncang keutuhan pemerintahan Islam dan mengubah arah sejarah politik umat selama berabad-abad berikutnya. Namun, dari peristiwa ini pula, umat belajar bahwa kepemimpinan dalam Islam harus selalu berpijak pada prinsip amanah (الأمانة), keadilan (العدل), dan musyawarah (الشورى), serta didukung oleh komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan rakyat. Nilai-nilai inilah yang menjadi pelajaran abadi dari peristiwa besar yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan, agar umat Islam di masa kini dan mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menilai dan memahami kebijakan seorang pemimpin yang berjuang demi kemaslahatan umat.

Nilai Etis dan Pelajaran Kepemimpinan dari Masa Khalifah Utsman bin Affan

Perjalanan kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan memberikan banyak pelajaran etis yang sangat penting bagi sejarah peradaban Islam. Utsman dikenal sebagai sosok pemimpin yang lembut, dermawan, pemalu, dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. (Gultom, 2013) Meskipun menghadapi berbagai fitnah dan tuduhan, termasuk isu nepotisme, beliau tetap menjaga ketenangan, tidak terpancing emosi, dan lebih memilih jalan damai daripada menimbulkan pertumpahan darah sesama Muslim. Sikap ini menunjukkan keagungan moral seorang pemimpin yang berlandaskan pada nilai-nilai ikhlas (الإخلاص) dan sabar (الصبر) dalam menghadapi ujian. Dalam situasi di mana banyak orang kehilangan kepercayaan dan termakan fitnah, Utsman tetap menunjukkan keteguhan iman dan kesetiaan pada prinsip-prinsip Islam. Berikut nilai-nilainya:

1. Amanah (الأمانة)

Amanah merupakan nilai etis utama yang ditunjukkan oleh Khalifah Utsman bin Affan sepanjang masa kepemimpinannya. Ia memandang kekuasaan bukan sebagai hak istimewa, tetapi sebagai titipan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Meskipun banyak tuduhan dan fitnah yang diarahkan kepadanya, Utsman tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Ia menolak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Bahkan ketika situasi genting memuncak, ia memilih untuk tidak menggunakan kekerasan, karena khawatir akan menumpahkan darah kaum Muslimin. Hal ini membuktikan bahwa Utsman benar-benar memahami makna amanah sebagai beban moral dan spiritual yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan kesetiaan terhadap nilai-nilai Islam.

2. Keadilan (العدل)

Keadilan menjadi prinsip moral yang sangat dijunjung tinggi oleh Khalifah Utsman. Dalam setiap kebijakan yang diambilnya, ia berusaha menegakkan keseimbangan dan memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Meskipun dituduh memihak keluarga, faktanya Utsman mengangkat mereka karena alasan kompetensi, bukan kekerabatan semata. Keadilan yang ia tegakkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hukum Allah SWT. Keadilan dalam pandangan Utsman adalah keharusan moral bagi setiap pemimpin agar masyarakat merasakan keamanan, kepercayaan, dan kedamaian.

3. Kesabaran (الصبر)

Kesabaran menjadi salah satu sifat paling menonjol dalam diri Utsman bin Affan. Ketika difitnah, dikhianati, bahkan dikepung oleh pemberontak di rumahnya sendiri, ia tetap bersabar dan tidak membalas dengan kekerasan. Ia memilih untuk menyerahkan

segalanya kepada kehendak Allah SWT. Sikap ini menunjukkan tingkat spiritualitas yang tinggi dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Kesabaran Utsman bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan moral seorang pemimpin yang lebih memilih mati syahid daripada melihat sesama Muslim saling membunuh. Dengan kesabarannya, Utsman mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari kekuasaan, tetapi dari kemampuan menahan diri dan menjaga prinsip di tengah tekanan. (Hadi, 2022)

4. Keikhlasan (الإخلاص)

Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang tulus dalam setiap tindakannya. Ia tidak mencari pujian atau keuntungan duniawi dari kepemimpinannya. Seluruh kebijakannya didasari oleh niat untuk mencari keridaan Allah SWT dan kemaslahatan umat. Keikhlasan ini tampak dalam tindakannya mendermakan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam, seperti ketika ia membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk umum, serta membiayai perluasan Masjid Nabawi. Ia juga membiayai persiapan pasukan dalam Perang Tabuk tanpa pamrih. Sikap ini menggambarkan pemimpin yang memegang prinsip bahwa setiap amal harus dilandasi niat yang bersih dan pengabdian yang tulus kepada Allah SWT.

5. Tawadhu' (التواضع)

Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah dan menduduki jabatan tertinggi sebagai khalifah, Utsman tetap menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia hidup sederhana dan tidak menonjolkan kekuasaan di hadapan rakyatnya. Dalam interaksi sosial, ia dikenal sopan, pemalu, dan menghormati siapa pun tanpa memandang status sosial. Kerendahan hatinya menjadi daya tarik moral yang membuat banyak sahabat dan masyarakat mencintainya. Nilai tawadhu' inilah yang menjadikan Utsman dihormati bukan karena jabatannya, tetapi karena kepribadiannya yang lembut dan penuh adab.

6. Kedermawanan (الكرم)

Utsman bin Affan dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk kepentingan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ia menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan keyakinan bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang diberikan. Contoh nyatanya adalah ketika ia mendermakan 1.000 dinar dan 300 unta untuk pasukan Tabuk, serta membeli sumur Raumah agar umat Islam bisa menikmati air bersih secara gratis. Sikap dermawan ini tidak hanya mencerminkan kasih sayang dan empati, tetapi juga memperlihatkan bahwa seorang pemimpin sejati harus rela berkorban demi kesejahteraan rakyatnya.

7. Musyawarah (المشورى)

Prinsip musyawarah menjadi ciri khas sistem pemerintahan Utsman bin Affan. Ia tidak membuat keputusan secara sepihak,

melainkan selalu melibatkan para sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Musyawarah dalam kepemimpinan Utsman menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bersifat kolektif dan konsultatif, bukan otoriter. Dengan musyawarah, setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi moral dan sosial. Utsman memahami betul bahwa musyawarah adalah wujud keadilan partisipatif yang mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. (Mu'aafi, 2024)

8. Keteguhan Iman (الثبات على الإيمان)

Salah satu nilai etis paling luhur dalam kepemimpinan Utsman adalah keteguhan imannya kepada Allah SWT. Sejak memeluk Islam di masa awal dakwah Rasulullah SAW, ia tidak pernah goyah meskipun mendapat tekanan keras dari keluarganya sendiri. Keteguhan iman ini terus ia bawa hingga masa kekhalifahannya, bahkan di saat hidupnya terancam oleh pemberontak. Utsman menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada kekuasaan atau militer, tetapi pada kekuatan iman yang menjadi sumber keberanian moral dan spiritual.

9. Keadaban (الأخلاق الحسنة)

Utsman dikenal memiliki akhlak yang sangat mulia dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ia menjaga lisannya dari kata-kata kasar, bersikap lembut terhadap bawahan, dan tidak mudah marah meskipun sering dihina. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa "malaikat pun merasa malu kepada Utsman", menunjukkan betapa tingginya akhlak beliau. Sikap beradab dan berperilaku sopan menjadi cerminan pemimpin beretika yang tidak memerintah dengan kekerasan, melainkan dengan keteladanan. Utsman mengajarkan bahwa akhlak adalah kekuatan utama dalam memimpin manusia dengan hati, bukan dengan ketakutan.

10. Komitmen terhadap Persatuan (الوحدّة)

Nilai etis terakhir yang sangat penting dalam kepemimpinan Utsman adalah komitmennya terhadap persatuan umat Islam. Dalam menghadapi fitnah dan pemberontakan, ia tidak pernah membalas dengan kekerasan karena khawatir akan memecah belah umat. Ia lebih memilih mengorbankan dirinya demi menjaga keutuhan kaum Muslimin. Tindakan ini menunjukkan bahwa bagi Utsman, menjaga persatuan umat lebih penting daripada mempertahankan jabatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga tentang etika, tanggung jawab, dan moralitas seorang pemimpin. Meskipun masa pemerintahannya diwarnai dengan tuduhan nepotisme dan pemberontakan, kajian mendalam

menunjukkan bahwa kebijakan Utsman berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan (العَدْل), amanah (الأمانة), dan musyawarah (الشورى) yang diajarkan dalam Islam. Pengangkatan kerabat dalam jabatan strategis bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan keputusan rasional untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan memastikan bahwa amanah negara dipegang oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Dari perjalanan kepemimpinan beliau, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai etis seperti amanah, keadilan, kesabaran, keikhlasan, dan komitmen terhadap persatuan umat menjadi pondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Khalifah Utsman bin Affan menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada kekuatan militer atau kedudukan politik, melainkan pada kekuatan iman, ketulusan niat, dan keteguhan moral. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa setiap pemimpin harus siap menghadapi fitnah dengan kebijaksanaan, menjaga keutuhan umat di atas kepentingan pribadi, serta menegakkan kebenaran tanpa kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiya, L. N., Rohman, I. N., & Assondani, M. M. N. U. (2024). Principles of Politics in Islam Based on the Qur'an and Their Application During the Caliphate Era: Prinsip-Prinsip Politik Dalam Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Penerapan Pada Masa Kekhalifahan. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(1).
- Bawazir, F. (2021). *Utsman bin Affan: Pemimpin yang dermawan, lemah lembut, dan murah hati*. Bandung: CV Razka Pustaka.
- Buana, M. A. (2024). Peristiwa Peristiwa Penting Pada Masa Khalifah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 45-52.
- Busra, A., & Fitriyadi, M. (2024). Manajemen Pendidikan Politik Khalifah Usman Bin Affan. *DIDAKTIK: Journal of Educational Studies*, 1(2), 51-59.
- Dalimunthe, L. A. (2024). Peradaban Islam Masa Khalifah Utsman bin Affan (24-36 H/644-656 M). *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 204-215.
- Desri, S., Nazaruddin, E., Ikhsan, S., Syadiq, A., & Hutasuhut, N. N. (2023). Gaya kepemimpinan Utsman bin Affan pada masa kepemimpinannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8255-8262.
- El-Basyiry, A. M. (2022). *Meneladani Kepemimpinan Khalifah: Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan*. Amzah.
- Fahlevi, K. A., & Fatiyah, F. (2023). Mengungkap Mispersepsi Siswa Madrasah Aliyah Atas Tuduhan Nepotisme Terhadap Khalifah Utsman Bin Affan (644-656 M). *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 3(1), 1-25.
- Gultom, A. N. (2022). Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*

- Dan Keagamaan, 6(2).*
- Hartono, H., & Prasetyo, T. A. (2024). Pemikiran Politik-Ekonomi Priode Al-Khulafa Al-Rasyidin (Telaah Kajian Politik Dan Ekonomi Dalam Perspektif Sejarah). *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah, 12(01)*, 32-42.
- Mu'aafi, D. (2024). *Jejak Nepotisme: Mengurai Benang Kusut Ketidakadilan-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Sidik, H., Nursyirwan, N., & Abdulahanaa, A. (2021). Nepotisme Gologan dan Jabatan: Upaya Penggalan Nilai-nilai Pengajaran Hukum Nepotisme dalam Perspektif Hadis. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam, 13(2)*, 189-216.
- Sirait, T. A. F., Sinaga, A. I., & Fajri, F. (2024). Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam. *Instructional Development Journal, 7(2)*, 281-286.
- Supriyadi, D., & Abd Djalil, M. (2022). *Sejarah Peradaban Islam*.